

BAB 2

PENDIDIKAN BERBASIS KOMUNITAS, PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN RANAH PEMBELAJARAN

Bab ini akan menguraikan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian melalui dua besaran. Kerangka pemikiran pertama berisikan konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan hubungannya dengan pendidikan berbasis komunitas (*community-based education*) dan Pusat Belajar Kegiatan Masyarakat (PKBM). Kerangka pemikiran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi maupun wawasan secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai konsep kesejahteraan sosial dalam arti luas dan pendidikan berbasis komunitas, yang terdiri dari konsep pendidikan berbasis komunitas, pendidikan nonformal berbasis komunitas, prinsip pendidikan berbasis komunitas, dan pendidikan berbasis komunitas yang kaitannya dengan pembangunan masyarakat, serta konsep mengenai pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Sedangkan pada kerangka pemikiran kedua berisikan konsep-konsep dan teori mengenai pemberdayaan masyarakat yang meliputi konsep pemberdayaan masyarakat, elemen pemberdayaan, tahap-tahap dalam pemberdayaan masyarakat, partisipasi di dalam pemberdayaan, serta konsep ranah pembelajaran untuk melihat aspek kebermanfaatan pendidikan berbasis masyarakat di komunitas sasaran. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menganalisa hasil temuan lapangan.

2.1. Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan sektor pendidikan merupakan bagian integral dalam sistem pembangunan nasional. Sebagai salah satu agenda pendidikan nasional, pemerintah telah berupaya menciptakan pemerataan dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Pemberian kesempatan dan pemerataan pendidikan inilah yang dijadikan barometer percepatan pembangunan di daerah. Landasan pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan menjadi inklud dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Pengembangan dan peningkatan SDM menjadi indikator keberhasilan sektor pembangunan. Bahkan dalam berbagai survei selalu menempatkan kualitas SDM sebagai sebuah instrumen untuk dijadikan parameter penilaian yang konkret. Instrumen penilaian ini mengharuskan sektor pendidikan menjadi suatu acuan normatif legal dalam sub sistem pembangunan.

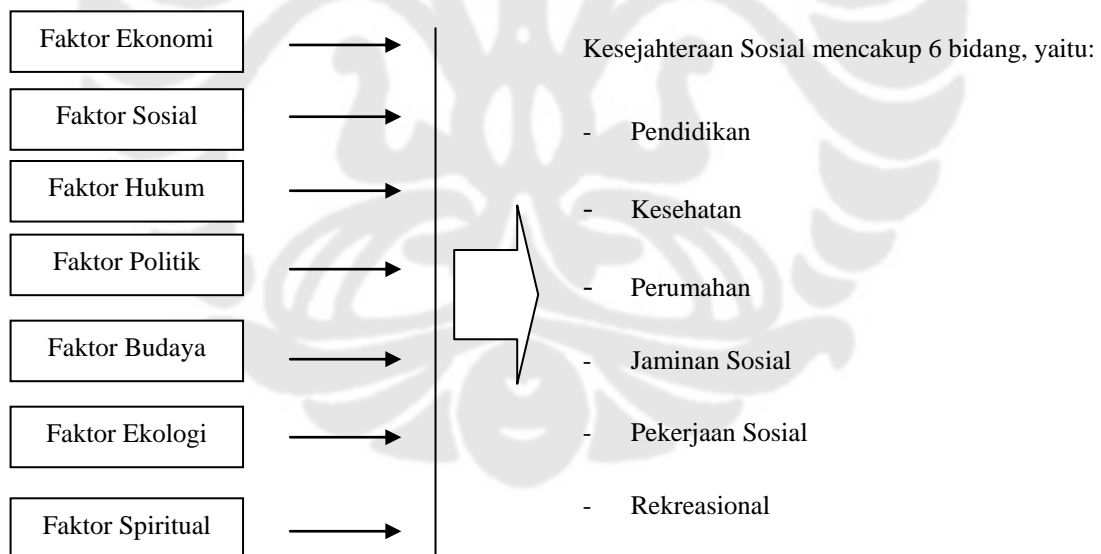
Secara kolektif pembangunan bangsa berbanding lurus dengan kemajuan sektor pendidikan. Sektor inilah yang secara ideal menjadi bagian yang terdepan untuk dilaksanakan dengan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat inilah yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah yang kemudian menjadi target pembangunan. Pembangunan pendidikan dalam jangka panjang dirumuskan dalam sebuah *master plan* pendidikan, rencana strategis pembangunan pendidikan, dan program-program kerja yang sistematis dan berkelanjutan. Program pengembangan kualitas SDM inilah yang tetap menjadi bagian terdepan untuk melaksanakan tugas pembangunan yang berorientasi pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kesejahteraan masyarakat (sosial) yang dimaksud disini, menurut Midgley (Adi, 2005:16) adalah suatu kondisi sosial dan bukan sekedar kegiatan amal yang dilakukan kelompok-kelompok *philanthropy*, juga bukan bantuan publik yang diberikan pemerintah. Kondisi kesejahteraan sosial akan terjadi ketika setiap individu di suatu masyarakat mengalami kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu sendiri dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, yang tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual (Adi, 2003, hal 40).

Kesejahteraan sosial dapat ditinjau dari berbagai aspek, baik sebagai gerakan, ilmu, suatu keadaan (kondisi), maupun kegiatan. Sebagai suatu kegiatan, menurut Adi (2003) kesejahteraan mewujudkan diri sebagai usaha kesejahteraan sosial yang dikembangkan untuk membantu, mengembangkan, dan mendukung terciptanya peningkatan taraf hidup individu, keluarga, ataupun masyarakat. Sedangkan sebagai suatu kondisi (keadaan), Midgley (2005) menyebutkan terdapat 3 elemen utama

untuk menciptakan suatu kesejahteraan sosial, yaitu *pertama*, sejauhmana masalah-masalah sosial ini diatur; *kedua*, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, *ketiga*, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan. Ketiga elemen ini berlaku bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas, bahkan seluruh masyarakat. Ketiga elemen ini selanjutnya dapat bekerja pada level sosial yang berbeda dan harus diaplikasikan ketika suatu masyarakat secara menyeluruh ingin menikmati berbagai hasil kesejahteraan sosial.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hendaknya mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Cox (Adi, 2002) mengidentifikasi 6 faktor yang saling berinteraksi dan perlu dipertimbangkan dalam hal ini, yakni faktor sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, dan ekologi. Selain 6 faktor tersebut, terdapat juga faktor spiritual sebagai faktor ketujuh (Adi, 2002, hal 123). Secara langsung atau tidak, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial. Hubungan tersebut nampak pada skema di berikut ini:



Gambar 2.1. Skema Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Arti Luas

Sumber: Adi, 2002, hal 130

Skema tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan sosial pada bidang pendidikan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor utama yang mempengaruhi bidang pendidikan adalah faktor ekonomi, dimana dengan faktor ekonomi seseorang yang telah terpenuhi maka dapat dengan mudah untuk mengakses berbagai jenis pendidikan yang diinginkan. Akan tetapi untuk memperoleh kesejahteraan bidang pendidikan, tidak hanya terpaku pada faktor ekonomi saja. Terdapat faktor-faktor lain, seperti faktor sosial dan faktor budaya yang dapat menjadi alternatif untuk mendapat kesejahteraan bidang pendidikan. Adapun faktor yang dipakai dalam penelitian ini adalah faktor sosial, karena yang dimaksud faktor sosial disini adalah berbagai model dan bentuk pendidikan berbasis masyarakat melalui jalur informal dan nonformal yang tidak membutuhkan faktor ekonomi untuk dapat mengaksesnya.

Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat, baik bersifat informal maupun nonformal, merupakan salah satu isu penting yang perlu diperdalam dalam kaitan dengan kesejahteraan sosial.

2.2. Pendidikan Berbasis Komunitas

Pendidikan berbasis komunitas (*community-based education*) merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis komunitas dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Mau tak mau pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. (Sudjana, 2000)

Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi pada konteks ini berupa kerja sama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktivitas pendidikan. Sebagai sebuah kerja sama, maka masyarakat diasumsi mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pendidikan. (Effendi, 2008)

2.2.1. Konsep Pendidikan Berbasis Komunitas

Pendidikan berbasis komunitas merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan berbasis komunitas menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengisi tantangan kehidupan yang berubah-ubah. Secara konseptual, pendidikan berbasis komunitas adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan “dari masyarakat” artinya pendidik memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan “oleh masyarakat” artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan, terutama pada saat pelaksanaannya. Adapun pengertian pendidikan “untuk masyarakat” artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat dikatakan, masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri. (Sihombing, 1999, hal 134).

Di dalam Undang-undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 16, arti dari pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan demikian nampak bahwa pendidikan berbasis komunitas pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang memberikan kemandirian dan kebebasan pada masyarakat untuk menentukan bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

Sementara itu di lingkungan akademik para ahli juga memberikan batasan pendidikan berbasis komunitas. Galbraith (1992) menjelaskan bahwa:

”community-based education could be defined as an educational process by which individuals (in this case adults) become more competent in their skills, attitudes, and concepts in an effort to live in and gain more control over local aspects of their communities through democratic participation.”

(pendidikan berbasis komunitas dapat diartikan sebagai proses pendidikan di mana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten dalam ketrampilan, sikap, dan konsep mereka dalam upaya untuk hidup dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui partisipasi demokratis)

Pendapat lebih luas tentang pendidikan berbasis komunitas dikemukakan oleh Smith (2008) adalah sebagai berikut:

”community-based education defined as a process designed to enrich the lives of individuals and groups by engaging with people living within a geographical area, or sharing a common interest, to develop voluntarily a range of learning, action, and reflection opportunities, determined by their personal, social, economic and political need.”

(pendidikan berbasis komunitas adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi mengenai kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan sukarela tempat pembelajaran, tindakan, dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik mereka)

Dengan demikian, pendekatan pendidikan berbasis komunitas adalah salah satu pendekatan yang menganggap masyarakat sebagai agen sekaligus tujuan, melihat pendidikan sebagai proses dan menganggap masyarakat sebagai fasilitator yang dapat menyebabkan perubahan menjadi lebih baik. Dari sini dapat ditarik pemahaman bahwa pendidikan dianggap berbasis komunitas jika tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaan berada di tangan masyarakat. Pendidikan berbasis komunitas bekerja atas asumsi bahwa setiap masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Baik masyarakat kota ataupun desa, mereka telah memiliki potensi untuk mengatasi masalah mereka sendiri berdasarkan sumber daya yang mereka miliki serta dengan memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 di dalam pasal 55 tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat/Komunitas disebutkan sebagai berikut :

1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis komunitas pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
2. Penyelenggara pendidikan berbasis komunitas mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis komunitas dapat bersumber-dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Lembaga pendidikan berbasis komunitas dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
5. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari kutipan di atas nampak bahwa pendidikan berbasis komunitas dapat diselenggarakan dalam jalur formal maupun nonformal, serta dasar dari pendidikan berbasis masyarakat adalah kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta masyarakat diberi kewenangan yang luas untuk mengelolanya. Karena itu dalam menyelenggarakannya perlu memperhatikan tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam hubungan ini, pendidikan nonformal berbasis komunitas adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik

dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. (Sihombing, 1999, hal 140)

Untuk itu tujuan dari pendidikan nonformal berbasis komunitas dapat mengarah pada isu-isu masyarakat yang khusus seperti pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, budaya dan sejarah etnis, kebijakan pemerintah, pendidikan politik dan kewarganegaraan, pendidikan keagamaan, pendidikan bertani, penanganan masalah kesehatan seperti korban narkoba, HIV/AIDS, dan sejenisnya. Sementara itu lembaga yang memberikan pendidikan kemasyarakatan bisa dari kalangan bisnis dan industri, lembaga-lembaga berbasis masyarakat, perhimpunan petani, organisasi kesehatan, organisasi pelayanan kemanusiaan, organisasi buruh, perpustakaan, museum, organisasi persaudaraan sosial, lembaga-lembaga keagamaan dan lain-lain (Sudjana, 2000).

2.2.2. Prinsip-prinsip Pendidikan Berbasis Komunitas

Menurut Galbraith (1992), pendidikan berbasis komunitas memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- *Self determination* (menentukan sendiri). Semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.
- *Self help* (menolong diri sendiri). Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri.

- *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan). Para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai ketrampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat.
- *Localization* (lokalisasi). Potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.
- *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian pelayanan). Terdapat hubungan antaragensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- *Reduce duplication of service*. Pelayanan Masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan mengoordinir usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan.
- *Accept diversity* (menerima perbedaan). Menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Ini berarti pelibatan warga masyarakat perlu dilakukan seluas mungkin dan mereka didorong/dituntut untuk aktif dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan.
- *Institutional responsiveness* (tanggung jawab kelembagaan). Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat. Lembaga harus dapat dengan cepat merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar manfaat lembaga akan terus dapat dirasakan.
- *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup) Kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar belakang masyarakat (Sudjana, 2000, hal 134).

Dalam perkembangannya, *community-based education* merupakan sebuah gerakan nasional di negara berkembang seperti Indonesia. *Community-based*

education diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*). Dengan sendirinya, manajemen pendidikan yang berdasarkan pada *community-based education* akan menampilkan wajah sebagai lembaga pendidikan dari masyarakat (Sudjana, 2000: hal 122). Salah satu bentuk jalur pendidikan nonformal yang menerapkan sistem *community based education* dan berkembang pesat di Indonesia adalah pusat kegiatan belajar masyarakat atau yang biasa disingkat menjadi PKBM.

2.3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

2.3.1. Konsep dan Tujuan PKBM

Secara akronim, PKBM berarti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM pada dasarnya merupakan tempat dimana orang-orang dapat mengikuti program kegiatan belajar. UNESCO (2003) menyebutkan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (*Community Learning Centre*) sebagai:

"...defined as a local educational institution outside the formal education system, for villages or urban slum areas, CLC programme is built on the past experience of implementing various adult, non-formal and continuing education. CLCs are usually set up and managed by community people"

(sebuah institusi pendidikan lokal di luar sistem pendidikan formal, untuk masyarakat desa atau daerah pinggiran. Program pada PKBM dibangun berdasarkan pada pengalaman yang dialami berbagai orang, bersifat nonformal, dan merupakan pendidikan berkelanjutan. PKBM biasanya juga dibentuk dan dikelola oleh masyarakat)

Sedangkan menurut Sihombing dan Gautama (1999:2) PKBM merupakan pusat (sentra) dan wadah seluruh kegiatan belajar masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, hobi, atau bakatnya yang dikelola/diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat, sebagai wadah untuk mempersiapkan warga masyarakat agar dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal peningkatan pendapatannya, dan sebagai salah satu upaya untuk lebih memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan rumusan di atas, PKBM pantas dipandang sebagai "center", dimana warga masyarakat, baik yang jauh maupun dekat dengan "center" tersebut dapat mengikuti program-program pendidikan luar sekolah (nonformal) yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan belajar kondisi pendidikan masyarakat tersebut. Dapat juga diartikan bahwa PKBM adalah suatu wahana luar sekolah yang didirikan dan dikelola oleh suatu komunitas tertentu/masyarakat setempat yang secara khusus berkonsentrasi dalam berbagai usaha pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, terutama untuk masyarakat setempat yang termarginalkan, sesuai dengan dinamika masyarakat tersebut. (Simanjuntak, 2003:104)

Sedangkan tujuan keberadaan PKBM di suatu komunitas pada dasarnya adalah peningkatan kualitas hidup komunitas tersebut dalam arti luas. Pemahaman tentang mutu hidup suatu komunitas sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh komunitas tersebut. Nilai-nilai yang diyakini oleh suatu komunitas akan berbeda dari suatu komunitas ke komunitas yang lain. Dengan demikian rumusan tujuan setiap PKBM tentunya menjadi unik untuk masing-masing PKBM. (Buletin PKBM, 2008:33) Sedangkan menurut UNESCO (2003), tujuan dari *Community Learning Center* adalah "...to empower individuals and promote community development through life-long education for all people in the community, including adults, youth and children of all ages." (untuk memberdayakan individu dan mempromosikan pengembangan masyarakat melalui pendidikan berkelanjutan untuk seluruh orang di dalam komunitas, termasuk orang dewasa, remaja, dan anak-anak dari semua umur).

2.3.2. Filosofi PKBM

Selanjutnya, seperti yang telah dirumuskan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi PKBM Indonesia (DPP FK-PKBM Indonesia) dalam buletin PKBM (2008, hal 31-33), PKBM yang memiliki filosofi "dari, oleh, dan untuk masyarakat" dapat pula dijabarkan berdasarkan pemaknaan nama dari akronim PKBM itu sendiri, yaitu:

1. **Pusat**, berarti bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah terkelola dan terlembagakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk efektivitas pencapaian

tujuan, mutu penyelenggaraan program, efisiensi pemanfaatan sumber-sumber, sinergitas antar berbagai program dan keberlanjutan keberadaan PKBM itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan kemudahan untuk dikenali dan diakses oleh seluruh anggota masyarakat, untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerjasama dengan berbagai pihak, baik yang berada di wilayah keberadaan PKBM tersebut maupun dengan berbagai pihak di luar wilayah tersebut misalnya pemerintah, lembaga-lembaga nasional dan internasional, dan sebagainya.

2. **Kegiatan**, berarti bahwa di dalam PKBM diselenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat. Ini juga berarti bahwa PKBM selalu dinamis, kreatif, produktif, dan inovatif dalam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan inilah yang merupakan inti dari keberadaan PKBM. Kegiatan-kegiatan ini tentunya juga sangat tergantung pada konteks kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat setempat.
3. **Belajar**, berarti bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di PKBM haruslah merupakan kegiatan yang mampu memberikan terciptanya suatu proses transformasi dan peningkatan kapasitas serta perilaku anggota komunitas tersebut ke arah yang lebih positif. Penggunaan kata 'belajar' dalam PKBM dan bukan kata 'pendidikan' juga memiliki makna tersendiri. Belajar lebih menekankan pada inisiatif dan kemauan yang kuat serta kedewasaan seseorang untuk dengan sadar menghendaki untuk mengubah dirinya kearah yang lebih baik. Belajar lebih menekankan upaya-upaya warga belajar itu sendiri sedangkan peran sumber belajar atau pengajar lebih sebagai fasilitator sehingga lebih bersifat *bottom up* dan lebih terkesan nonformal. Sedangkan pendidikan sebaliknya lebih bersifat *top-down*, dan lebih terkesan formal, karena inisiatif lebih banyak datang dari sumber belajar atau pengajar. Dengan demikian PKBM merupakan suatu institusi terdepan yang langsung berada ditengah-tengah masyarakat yang mengelola dan mengimplementasikan konsep belajar sepanjang hayat atau *life long learning* dan *life long education*, serta pendidikan untuk semua (*education for all*).
4. **Masyarakat**, berarti bahwa PKBM adalah upaya bersama suatu masyarakat untuk memajukan dirinya sendiri secara bersama-sama sesuai dengan ukuran-

ukuran idealisasi masyarakat itu sendiri akan makna kehidupan. Dengan demikian ciri-ciri suatu masyarakat akan sangat kental mewarnai suatu PKBM baik mewarnai tujuan-tujuannya, pilihan dan desain program dan kegiatan yang diselenggarakan, serta budaya yang dikembangkan dan dijiwai dalam kepemimpinan dan pengelolaan kelebagaannya. PKBM bukanlah suatu institusi yang dikelola secara personal, individual, dan elitis. Dengan pemahaman ini tentunya akan lebih baik apabila PKBM tidak merupakan institusi yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok elitis tertentu dalam suatu masyarakat. Kata 'masyarakat' juga untuk membedakan secara dikotomis dengan lembaga pemerintah. Artinya seyogyanya PKBM itu milik masyarakat, bukan milik pemerintah. Kontribusi pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi keberlangsungan dan pengembangan PKBM dapat saja jauh lebih besar porsinya dibandingkan kontribusi masyarakat dalam nilai kuantitas tetapi semuanya itu haruslah diposisikan dalam kerangka dukungan bukan mengambil alih tanggungjawab masyarakat. Bahkan sebaliknya, tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan dan pembinaan PKBM haruslah tercermin dalam alokasi anggaran pemerintah untuk membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana PKBM serta dana operasional PKBM dalam rangka memperkuat penyelenggaraan dan mutu program PKBM namun keseluruhannya itu haruslah dikembangkan selaras dengan dukungan bagi penguatan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengelola PKBM.

2.3.3. Jenis PKBM

Apabila ditinjau dari jenisnya, UNESCO (Visi, 2003, hal 28) membagi PKBM menjadi tiga jenis berikut:

- PKBM yang berbasis masyarakat, yaitu suatu PKBM yang diorganisir masyarakat dan semua sarana serta prasarana, sumber daya manusia, dana dan program pendidikan berasal dan ditentukan oleh masyarakat. Pengertian masyarakat di sini mengacu pada yayasan, organisasi masyarakat atau keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, pondok pesantren maupun kumpulan perorangan. Pemerintah lebih banyak berperan membantu dalam hal pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia PKBM,

memberi subsidi dalam bentuk hibah, serta sarana-sarana pendidikan lainnya, seperti buku-buku dan alat bantu belajar. PKBM jenis ini dikelola oleh suatu struktur organisasi yang melaksanakan kegiatan PKBM sehari-hari. Struktur tersebut biasanya dilengkapi oleh bagian-bagian yang bertanggungjawab dalam pengelolaan setiap program pendidikan luar sekolah.

- PKBM yang berbasis kelembagaan, yaitu suatu PKBM yang diorganisir oleh pemerintah, dan semua sarana/prasarana, sumber daya manusia, dana, organisasi dan programnya berasal dari pemerintah. PKBM yang seperti ini merupakan bagian dari birokrasi. Program-program pendidikan luar sekolah, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu menengah dan panjang, semuanya ditanggung oleh pemerintah. PKBM seperti ini biasanya berupa Balai-Balai Latihan yang dikelola Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, atau Sanggar Kegiatan Belajar yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional, dll.
- PKBM yang berbasis komprehensif, yaitu PKBM yang merupakan kombinasi antara PKBM yang berbasis masyarakat dan PKBM yang berbasis kelembagaan. Apabila PKBM yang berbasis masyarakat mengembangkan PKBM seperti satelit yang berbasis kelembagaan, maka akan melahirkan PKBM yang berbasis komprehensif. Sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan dana dapat diorganisir untuk saling melengkapi dalam melaksanakan program-program pendidikan luar sekolah.

Saat ini, PKBM yang banyak berkembang dan perkembangannya sangat bervariasi mulai dari kurang maju, berkembang, sampai berkembang dengan pesat adalah PKBM jenis pertama, yang hingga kini telah tersebar hampir di semua propinsi di Indonesia. PKBM jenis kedua juga berkembang, hanya saja jumlahnya masih sangat terbatas, dan PKBM jenis ketiga, sampai saat ini masih belum berkembang.

2.3.4. Bidang Kegiatan PKBM

Selaras dengan tujuan PKBM yaitu terwujudnya peningkatan mutu hidup komunitas, dimana dimensi mutu kehidupan itu sangatlah luas, maka bidang kegiatan

yang dicakup oleh suatu PKBM pun sangatlah luas, mencakup semua dimensi kehidupan itu sendiri. Untuk memudahkan dalam analisis, perencanaan dan evaluasi, keragaman bidang kegiatan yang diselenggarakan di PKBM ini dapat saja dikelompokkan dalam beberapa kelompok kegiatan yang lebih sedikit namun menggambarkan kemiripan ciri dari setiap kegiatan yang tergolong di dalamnya. Untuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia, berdasarkan pengalaman PKBM, seluruh kegiatan PKBM dapat dikelompokkan dalam tiga bidang kegiatan, yaitu bidang kegiatan pembelajaran (*learning activities*), bidang kegiatan usaha ekonomi produktif (*business activities*), dan bidang kegiatan pengembangan masyarakat (*community development activities*).

1. Kegiatan pembelajaran.

Yang termasuk dalam bidang kegiatan pembelajaran adalah semua kegiatan yang merupakan proses pembelajaran bagi anggota komunitas dan berupaya melakukan transformasi kapasitas/kemampuan/kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual, watak dan kepribadian meliputi aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Pembelajaran juga mencakup seluruh kalangan, baik dari usia dini sampai lanjut usia, dan semua orang tanpa terkecuali. Yang termasuk pada bidang kegiatan ini adalah:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Pendidikan Kesetaraan, yang terdiri dari Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), Paket C (setara SMA)
- c. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
- d. Program Pendidikan Keterampilan dan Kewirausahaan

2. Kegiatan Usaha/Ekonomi Produktif (bisnis). Bidang kegiatan ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas/pemberdayaan ekonomi anggota komunitas. Di dalamnya mencakup berbagai program antara lain:

- a. Unit Usaha PKBM
- b. Kelompok Belajar Usaha
- c. pengembangan usaha warga masyarakat
- f. penciptaan lapangan kerja baru

3. Kegiatan Pengembangan Masyarakat

Bidang pengembangan masyarakat mencakup berbagai kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas komunitas tersebut sebagai suatu kelompok/komunal. Di dalamnya tercakup berbagai jenis kegiatan seperti:

- penguatan sarana/prasarana/infrastruktur baik fisik maupun nonfisik
- perbaikan dan pengembangan lingkungan
- penggalian, pengembangan, dan pembudayaan bahasa dan budaya asli komunitas tersebut
- pembaharuan sistem kaderisasi kepemimpinan komunitas
- pembaharuan dan penguatan pranata sosial komunitas

2.3.5. Parameter PKBM

Yang dimaksud parameter PKBM adalah pengukuran kemajuan suatu PKBM dalam melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Adapun parameter PKBM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi masyarakat (*community participation*)

Salah satu ukuran kemajuan suatu PKBM adalah kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pendirian, penyelenggaraan maupun pengembangan PKBM. Semakin tinggi jumlah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam suatu PKBM maka semakin tinggi pula dianggap keberhasilan dan kemajuan PKBM tersebut. Demikian juga semakin tinggi mutu keterlibatan masyarakat setempat dalam suatu PKBM menggambarkan semakin tinggi kemajuan suatu PKBM. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu PKBM, akan terlihat dalam setiap proses manajemen yang ada. Baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian maupun dalam berbagai kegiatan dan permasalahan yang ada di PKBM tersebut.

b. Kebermanfaatan bagi warga belajar

Parameter berikutnya untuk mengukur tingkat kemajuan suatu PKBM adalah manfaat yang dirasakan bagi warga belajar (masyarakat). Yang dimaksud dengan manfaat yaitu seberapa besar PKBM tersebut telah memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu kehidupan komunitas tersebut. Sumbangan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan anggota masyarakat, peningkatan keterampilan, perbaikan perilaku, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penciptaan keharmonisan, dll.

c. Mutu dan Relevansi program

Mutu dan relevansi program yang diselenggarakan oleh PKBM merupakan parameter berikutnya bagi kemajuan suatu PKBM. Untuk menilai mutu dan relevansi program yang diselenggarakan, perlu diperhatikan input, proses, dan output dalam pelaksanaan program.

d. Kemandirian dan Keberlanjutan Lembaga (*sustainability*)

Yang dimaksud kemandirian disini adalah kemampuan PKBM untuk tetap berjalan dengan baik dalam melaksanakan berbagai programnya tanpa harus bergantung pada pihak lain di luar sistem PKBM tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan keberlanjutan lembaga di sini adalah kemampuan PKBM untuk tetap bertahan terus menerus dalam melaksanakan seluruh programnya sesuai dengan dinamika kebutuhan yang ada di komunitas tersebut. Untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan lembaga perlu dikembangkan sistem pendanaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan lembaga dalam melakukan inovasi program, membangun sistem manajemen yang baik, melakukan pelatihan, dan pengembangan personalia yang baik dan melakukan sistem kaderisasi kepemimpinan yang baik. (Visi, 2003, hal 45)

Dari berbagai keterangan dan informasi mengenai pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dapat dilihat bahwa program pembelajaran yang diselenggarakan oleh PKBM merupakan salah satu bentuk dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jenis kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada pengembangan kapasitas warga belajar, baik kapasitas pengetahuan, kapasitas pemberdayaan ekonomi, maupun pengembangan sikap dan

mental warga belajar. Selain itu, pada parameter PKBM juga disebutkan bahwa salah satu kunci keberhasilan PKBM adalah dengan adanya partisipasi masyarakat yang erat kaitannya dengan proses pada pemberdayaan masyarakat.

2.4. Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan kesejahteraan sosial dalam arti luas pada dasarnya juga merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan terhadap kelompok sasaran seringkali diidentikkan sebagai upaya memberdayakan (mengembangkan kelompok sasaran dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. (Adi, 2002, hal 161-162). Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan ini selalu bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Menurut Ife (1995, hal 61-64), pengertian kekuasaan tidak berhenti pada kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan seseorang atas beberapa hal berikut.

- Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan, dan memengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan.
- Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan, dan sosialisasi.

Ife (1995, hal 182) juga menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah *”empowerment means providing people with the resources, opportunity, knowledge, and skill to increase their capacities to determine their own future, and to participate in and affect of their community”* (pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas itu sendiri). Selain itu, Ife (1995, hal 56) menambahkan bahwa *”empowerment aims to increase the power of the disadvantaged”* (pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dari mereka yang tidak beruntung).

Pendapat Ife ini sejalan dengan Kabeer (2001, hal 19) yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat pilihan. Lebih lanjut menurut Kabeer, pilihan di sini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memilih hal lain sebagai alternatif. Adapun pengertian pemberdayaan di sini menurut Kabeer yaitu: *”Empowerment thus refers to the expansion in people’s ability to make strategic life choices in a context where this ability was previously denied to them.”* (Pemberdayaan merujuk pada ekspansi kemampuan seseorang untuk membuat pilihan hidup yang strategis dalam konteks di mana kemampuan ini sebelumnya tidak diakui).

Sejalan dengan Ife dan Kabeer, Alsop dkk (2006, hal 10) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut, yaitu *”Empowerment is defined as a group’s or individual’s capacity to make effective choice, that is, to make choices and then to transform those choices into desired actions and outcomes.”* (Pemberdayaan diartikan sebagai kapasitas kelompok atau individu untuk membuat pilihan yang efektif, yaitu membuat pilihan dan kemudian mengubah pilihan tersebut ke dalam tindakan atau hasil yang diharapkan)

Di sini Alsop menekankan bahwa suatu pemberdayaan akan berjalan dengan baik, apabila kelompok atau individu memiliki dan menentukan pilihan atas sumber daya yang tersedia. Memiliki pilihan bukanlah akhir dari pemberdayaan itu sendiri, namun menerjemahkan pilihan tersebut menjadi sebuah proses mencapai tujuan yang diharapkan adalah makna dari pemberdayaan itu sendiri. Pernyataan Alsop ini senada

dengan Hogan yang mengemukakan bahwa pemberdayaan individu merupakan proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukan suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja. Menurutnya, *"empowerment is not an end-state, but a process that all human beings experiences"* (Adi, 2002, hal 165).

Hal ini juga berlaku berlaku pada suatu pemberdayaan masyarakat, dimana dalam suatu komunitas, proses pemberdayaan masyarakat tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu tetap ada dan mau berusaha untuk memberdayakan dirinya.

Menurut Chambers (Kartasasmita, 1996, hal 142), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *"people centered, participatory, empowering, and sustainable"*. Sedangkan Kartasasmita menjelaskan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (1996, hal 144). Kemudian Friedman menyatakan bahwa :

"the empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision making of territorially organized communities, local self reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning".

(pendekatan pemberdayaan, adalah hal mendasar dalam pembangunan alternatif, menekankan pada otonomi dalam pengambilan keputusan dari masyarakat yang secara teritorial terorganisasi, memperkuat kemandirian lokal (tetapi tidak autarki), demokrasi langsung (partisipatoris), dan pengalaman bersosial). (Kartasasmita, 1996, hal 143)

Terkait dengan definisi di atas, pembangunan alternatif bertujuan untuk memanusiakan suatu sistem yang membungkam mereka dan untuk mencapai tujuan ini diperlukan bentuk-bentuk perlawanan dan perjuangan politis yang menekankan hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara yang tersingkir. Sedangkan Chambers menyebut pembangunan alternatif sebagai paradigma pembalikan (*the*

paradigm of reversal), yakni menempatkan terlebih dahulu berbagai prioritas kaum miskin (Pranarka dan Moeljarto, 1996, hal 59).

Shardlow (dalam Adi, 2002, hal 162) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya adalah membahas bagaimana individu, kelompok, maupun komunitas, berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Shardlow menggambarkan pemberdayaan sebagai suatu gagasan yang dikenal sebagai *self determination*, yaitu usaha untuk mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Payne dalam Adi (2003, hal 54) mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan untuk:

”to help the clien gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to client”

(membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui transfer daya dari lingkungan)

Menurut Kartasasmita (1996, hal 139), upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Pemberdayaan masyarakat nantinya diharapkan dapat membuat individu maupun kelompok yang menjadi sasaran dapat menjadi mandiri dan berdaya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. *Ketiga*, memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat

lemah. Untuk memperoleh gambaran mengenai konsep pemberdayaan, beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan oleh dari beberapa tokoh telah dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Pengertian Pemberdayaan

Tokoh	Pengertian Pemberdayaan
<p>Payne (1997) (Adi, 2003, hal 54)</p>	<p><i>”to help the clien gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to client”</i></p> <p>(membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui transfer daya dari lingkungan)</p>
<p>Friedman (Kartasmita, 1996, hal 143)</p>	<p><i>“the empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision marking of territorially organized communities, local self reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning”.</i></p> <p>(pendekatan pemberdayaan, adalah hal mendasar dalam pembangunan alernatif, menekankan pada otonomi dalam pengambilan keputusan dari masyarakat yang secara territorial terorganisasi, memperkuat kemandirian lokal (<i>tetapi tidak autarki</i>), demokrasi langsung (<i>partisipatoris</i>), dan pengalaman bersosial)</p>
<p>Ife (1995, hal 182)</p>	<p><i>”...empowerment means providing people with the resources, opportunity, knowledge, and skill to increase their capacities to determine their own future, and to participate in and affect of their community...”</i></p> <p>”...pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas itu sendiri...”</p>
<p>Adams (2003, hal 8)</p>	<p><i>”That means by which individuals, groups, and/or communities, became able to take control of their circumstances and achieve their own goals, thereby being able to work towards helping themselves and others to maximise the quality of their lives”</i></p> <p>(Kemampuan individu, kelompok, dan komunitas dalam mengontrol keadaan dan meraih tujuan mereka, dengan cara demikian mereka dapat menolong diri mereka sendiri dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka)</p>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dari pengertian pemberdayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu cara untuk menjadikan orang yang tidak atau kurang berdaya menjadi lebih berdaya, memaksimalkan kualitas hidup kemanusiaan, merelokasi kekuatan/kekuasaan melalui modifikasi struktur sosial, serta proses untuk memperoleh kekuatan, kompetisi, kapasitas, kebebasan, dan kemerdekaan diri sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi (2000, hal 70-75) bahwa pemberdayaan menekankan pada *process goal*, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai prinsip demokratis.

Adapun pengertian pemberdayaan yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan pengertian dari Ife dan Adams, yaitu pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas itu sendiri. Dengan demikian, mereka dapat menolong diri mereka sendiri dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka. Alasan menggunakan definisi tersebut dalam penelitian ini karena penelitian ini berusaha melihat bahwa pendidikan nonformal berbasis masyarakat melalui PKBM dipandang sebagai suatu metode, cara, jalan, atau media untuk memberdayakan masyarakat, baik sebagai individu, kelompok, maupun komunitas, untuk meraih tujuan bersama.

Pemberdayaan sebagai suatu program dimana pemberdayaan dilihat dari tahap-tahap kegiatan guna mencapai tujuan, yang biasanya telah ditentukan jangka waktunya. Pemberdayaan sebagai suatu program harus direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat masyarakat agar dapat lebih pandai, mampu mengembangkan komunikasi antar mereka, sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi ketika agen perubah berasal dari luar (baik itu berasal dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah), telah menyelesaikan programnya

maka pemberdayaan sebagai proses tetap berlangsung pada kelompok sasaran tersebut (Adi, 2002, hal 176).

2.4.1 Elemen Pemberdayaan Masyarakat

Narayan (2002:18) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan suatu komunitas didukung oleh beberapa elemen berikut:

a. Akses terhadap informasi

Informasi merupakan kekuasaan. Masyarakat yang memiliki informasi adalah masyarakat yang memiliki kesempatan, akses terhadap pelayanan, mampu bernegosiasi secara efektif, mampu memperjuangkan hak-hak dasarnya. Tanpa informasi yang relevan, berjangka waktu dan diperoleh dalam bentuk yang dapat dimengerti, mustahil bagi suatu komunitas untuk melakukan tindakan yang efektif. Informasi diperoleh tidak berhenti pada kata-kata yang tertulis, namun dapat diperoleh melalui diskusi kelompok, puisi, cerita, debat, teater jalanan, dan opera jalanan, dan biasanya menggunakan media.

b. Inklusi dan partisipasi

Inklusi memfokuskan pada pertanyaan siapa: siapa yang terlibat? Partisipasi juga menanyakan bagaimana mereka terlibat dan peran apa yang dapat dimainkan. Inklusi pada suatu komunitas merupakan aspek penting dalam proses pembuatan kebijakan untuk menjamin bahwa sumber daya publik yang terbatas dibangun atas pengetahuan dan prioritas lokal, dan memiliki komitmen untuk membuat suatu perubahan. Usaha untuk mempertahankan inklusi dan partisipasi membutuhkan perubahan peraturan agar masyarakat memiliki ruang untuk berdiskusi dan berpartisipasi secara langsung dalam penentuan kebijakan lokal dan nasional, penyusunan anggaran, dan pemberian pelayanan dasar. Dalam hal ini, kita dapat melihat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan memiliki peranan yang vital untuk menentukan berjalan atau tidaknya suatu pemberdayaan.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan untuk pemerintah, perusahaan swasta atau penyedia pelayanan untuk dapat mempertanggungjawabkan

kebijakan, tindakan yang, serta penggunaan dana yang mendukung pelaksanaan tindakan tersebut. Terdapat tiga tipe mekanisme akuntabilitas yaitu mekanisme politik, administratif, dan publik. Akuntabilitas politik terjadi melalui partai politik dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Akuntabilitas administratif dapat terjadi melalui mekanisme akuntabilitas internal lembaga pemerintah. Sementara mekanisme akuntabilitas sosial merupakan suatu upaya pemerintah untuk dapat akuntabel bagi warganya. Akuntabilitas sosial dapat mendorong mekanisme akuntabilitas politik dan administratif.

d. Kapasitas organisasi lokal

Kapasitas organisasi lokal merujuk pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, mengorganisasikan diri mereka, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah. Seringkali, di luar jangkauan sistem formal, komunitas saling mendukung satu sama lain dan memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Organisasi masyarakat umumnya bersifat informal.

2.4.2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik (Adi, 2002:179). Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 1), dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penyadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (*self help*).

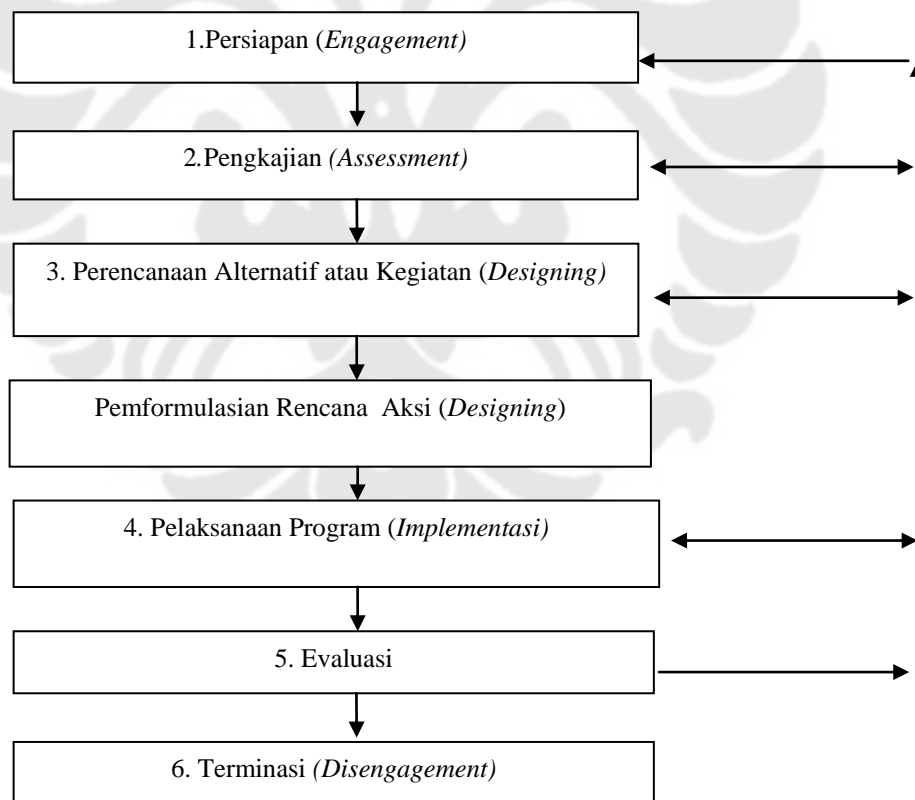
b. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity building*, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.

c. Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Sedangkan Adi (2002) menjabarkan tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan berdasarkan masukan dari Cox mengenai tahapan dalam program pemberdayaan masyarakat. Model pemberdayaan, meskipun disebut sebagai tahapan, namun bukanlah suatu tahapan yang menyerupai anak tangga, dimana seseorang harus berjalan melalui tahap demi tahap secara berurutan, melainkan merupakan tahapan yang berbentuk siklus (*cyclical*) dan spiral dimana agen perubah dimungkinkan untuk kembali ke tahap sebelumnya apabila mendapatkan masukan baru yang dapat digunakan untuk menyempurnakan program pemberdayaan tersebut. Tahapan dalam program pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam skema berikut (Adi, 2002:181):



Gambar 2.2. Tahapan Program Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: (Adi, 2002,h.181)

Bila dilihat dari skema di atas, maka terlihat adanya panah dua arah pada tahap 2, 3, dan 4 yang menunjukkan adanya kemungkinan untuk meninjau ulang tahap-tahap tersebut dan kembali ke tahap sebelumnya. Sehingga program pemberdayaan masyarakat bukan sekedar menjadi program pemberdayaan masyarakat yang bersifat kaku, tetapi lebih merupakan suatu program pemberdayaan yang bersifat fleksibel dan berusaha untuk tanggap atas perubahan dan kebutuhan yang berkembang pada komunitas sasaran.

Untuk lebih memperjelas skema dari masing-masing tahap di atas, maka akan diuraikan secara singkat tahap-tahap pemberdayaan masyarakat seperti yang tergambar di atas sebagai berikut (Adi, 2002, h.182-196):

a. Tahap *Engagement*

Tahap ini biasa disebut juga dengan tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, setidaknya terdapat dua tahapan yang harus dilakukan, yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan.

- i. Penyiapan petugas, merupakan penyiapan tenaga pemberdaya masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*. Tahap ini diperlukan terutama untuk menyamakan persepsi antar anggota tim agen perubah (*change agent*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Penyiapan petugas lebih diperlukan bila dalam suatu program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan memiliki tenaga petugas yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya.
- ii. Penyiapan lapangan, merupakan prasyarat suksesnya suatu program pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Pada tahap ini *community worker* pada awalnya melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal maupun formal. Bila telah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, *community worker* harus mendapat perijinan dari pihak terkait sehubungan dengan program yang akan dijalankan. Disamping itu, *community worker* juga tetap harus menjalin relasi dengan tokoh-tokoh informal (*informal leader*) agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

b. Tahap *Assessment*

Tahap ini biasa disebut dengan proses pengkajian. Tahap ini dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat (*key-person*) dengan melakukan *individual assessment*, dan dapat juga melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan menggunakan metode diskusi kelompok terfokus, curah pendapat, ataupun *nominal group process*. Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubah berusaha untuk mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan = *felt needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Selain itu, dalam proses *assessment* ini dapat pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat Kekuatan (*Strenght*), Kelemahan (*Weaknesses*), Kesempatan (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*). Tahap pengkajian ini sebaiknya masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Di samping itu, pada tahap ini pelaku perubahan juga mempunyai peran edukasional untuk memfasilitasi warga dalam menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya maupun memberikan informasi pada masyarakat agar mereka dapat berdiskusi dan mempertimbangkan keadaan lingkungan mereka secara lebih rasional.

c. Tahap *Designing*

Pada tahap ini, hal yang dilakukan petugas adalah melakukan perencanaan alternatif program. Petugas sebagai agen perubah (*change agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. Program dan kegiatan yang akan mereka kembangkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan pemberian bantuan sehingga tidak muncul program-program yang bersifat *charity* (amal) yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang. Dalam proses ini petugas bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan pada saat itu.

Setelah itu, petugas membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama apabila terkait dengan pembuatan proposal kegiatan kepada pihak penyandang dana. Bantuan ini biasanya amat diperlukan terutama pada kelompok yang belum pernah mengajukan proposal kepada penyandang dana. Dalam tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Sehingga nantinya dapat diarahkan sesuai dengan apa yang sudah diformulasikan.

d. Tahap Implementasi

Tahap pelaksanaan program (implementasi) merupakan tahap yang paling krusial (penting) dalam program pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan apabila tidak ada kerja sama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga. Dalam upaya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Selain itu, dalam pelaksanaan program ini seringkali teknologi yang digunakan pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya.

e. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga, pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat terbentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih 'mandiri' dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Akan tetapi kadangkala dari hasil pemantauan dan evaluasi ternyata hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bila ini yang terjadi maka evaluasi proses diharapkan akan dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan suatu program ataupun

kegiatan. Sehingga bila diperlukan maka dapat dilakukan kembali *assessment* terhadap permasalahan yang dirasakan masyarakat ataupun terhadap sumber daya yang tersedia. Karena agen perubah (*change agent*) juga menyadari bahwa tolok ukur (*benchmark*) suatu masyarakat juga dapat berkembang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan yang sudah terjadi. Evaluasi itu sendiri dapat dilakukan pada input, proses (pemantauan = *monitoring*), dan juga pada hasil.

f. Tahap *Disengagement*

Tahap ini berupa tahap terminasi, yaitu 'pemutusan' hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam suatu program pemberdayaan masyarakat, tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat dapat dianggap "mandiri", tetapi lebih karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. Meskipun demikian, petugas harus tetap keluar dari komunitas sasaran secara bertahap dan bukan secara mendadak. Hal ini perlu dilakukan agar warga masyarakat tidak merasa ditinggalkan secara sepihak dan tanpa disiapkan oleh petugas. Karena itu, apabila petugas merasa bahwa tugasnya belum diselesaikan dengan baik tidak jarang petugas tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin, dan kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

2.5 Ranah Pembelajaran (*Learning Domains*)

Ada lebih dari satu tipe pembelajaran. Bloom mengemukakan bahwa terdapat tiga ranah dari aktifitas pembelajaran yang diidentifikasi, yaitu:

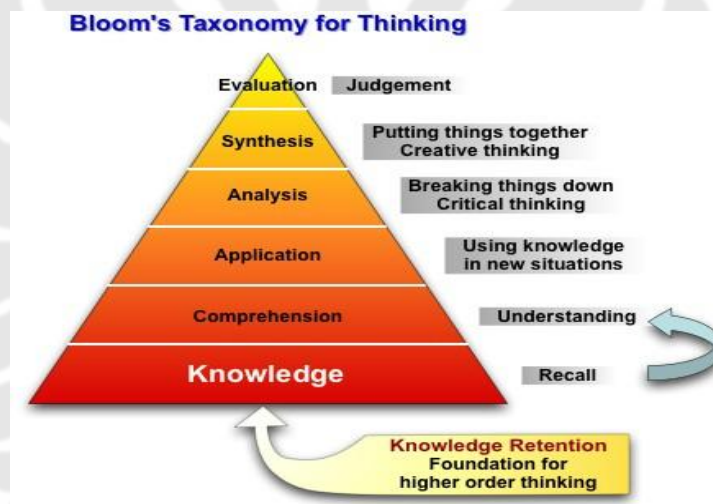
1. Kognitif: kemampuan intelektual (pengetahuan)
2. Afektif: perkembangan perasaan atau emosi (sikap)
3. Psikomotorik: kemampuan manual atau fisik (keterampilan)

(*Learning*, 2007, hal.1-5)

2.5.1 Ranah Kognitif

Ranah kognitif mencakup pengetahuan dan perkembangan kemampuan intelektual. Hal ini termasuk mengingat kembali atau pengakuan terhadap fakta-fakta, pola-pola prosedur dan konsep-konsep yang dijalankan di dalam pengembangan kemampuan intelektual dan *skill*. Di bawah ini terdapat enam kategori dari ranah kognitif, dimulai dari tingkah laku yang paling sederhana sampai ke tingkah laku yang kompleks. Kategori-kategori ini dapat disebut juga sebagai tingkatan-tingkatan kesulitan. Dimana kategori yang pertama harus dikuasai lebih dahulu sebelum memulai untuk lanjut ketahap selanjutnya.

Tingkatan atau tahapan pembelajaran merupakan pemikiran yang dibangun satu dengan yang lain. Keenam tingkatan pada gambar 2.6 berkaitan dengan tahapan berpikir yang akrab disebut sebagai ranah kognitif.



Gambar 2.3. Enam Tahapan Pembelajaran Kognitif Bloom

Sumber: (Taxonomy, 2008, h.1)

Sebagaimana telah terlihat di gambar 2.6 tingkatan atau tahapan tertinggi dari pembelajaran membutuhkan tahapan penguasaan dari tahap sebelumnya. Karena tahapan tertinggi dari pembelajaran harus dilakukan dengan tingkat kecedasan dan pengetahuan yang cukup. Penjelasan ranah ini akan dimulai dari yang terbawah (*Bloom*, 2008, hal 1-2).

1. Pengetahuan atau pengambilan kembali data. Menyatakan desakan alamiah untuk mengulang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi pengetahuan dapat menjadi dasar dari pembelajaran. Pengetahuan memberikan dasar untuk berfikir

ke level yang lebih tinggi. Misalnya mengulang kembali isi dari kebijakan, mengingat-ingat harga suatu produk dan menyampaikannya kepada pelanggan serta mengetahui prosedur-prosedur yang aman.

2. Pemahaman, adalah kemampuan untuk menyerap makna, menjelaskan, menyatakan kembali ide-ide, pengertian lebih jauh, mengerti dasar-dasar dari informasi dan menerjemahkan, menginterpretasikan dan memperhitungkan kemungkinan maksud dari makna. Contohnya dapat menuliskan kembali prinsip-prinsip dari suatu tes penulisan, menjelaskan dengan kata-kata sendiri langkah-langkah dalam menjalani suatu tugas yang kompleks, menerjemahkan suatu persamaan ke dalam lembar komputer.
3. Aplikasi atau penerapan, menggunakan materi-materi yang telah dipelajari di dalam situasi-situasi baru. Hal ini termasuk mempergunakan informasi, ide dan kemampuan untuk mengatasi masalah dan kemudian memilih cara dan menerapkannya secara tepat. Misalnya menggunakan cara-cara manual untuk menghitung waktu kerja karyawan, menerapkan hukum-hukum seperti statistika untuk mengevaluasi kebenaran di dalam tes tertulis.
4. Analisa, anjuran pemisahan hal-hal atau pemisahan materi kedalam komponen-komponen dan memperlihatkan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Hal ini termasuk juga kemampuan untuk memecah informasi dan ide ke dalam bagian komponennya. Misalnya mencari atau memecahkan pecahan masalah dengan menggunakan pengambilan kesimpulan secara logis, menghindari kesalahan logis berikut dengan alasannya, mengumpulkan informasi dari pertemuan dan memilih atau menempatkan tugas-tugas yang dibutuhkan untuk dilatih.
5. Meniru atau sintesa, kemampuan untuk mengumpulkan ide-ide yang terpisah untuk membentuk suatu struktur baru atau mendirikan hubungan-hubungan baru. Meniru termasuk di dalamnya mengumpulkan ide-ide dan pengetahuan dalam suatu bentuk yang baru dan unik. Misalnya menuliskan orasi dari perusahaan (lembaga) atau proses manual. Mendisain mesin untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik. Mengintegrasikan pelatihan dari beberapa sumber untuk mengatasi permasalahan, meninjau kembali dan memprosesnya untuk meningkatkan hasil.

6. Evaluasi, merupakan level tertinggi dari tahapan atau tingkatan ini. Evaluasi adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan dan nilai-nilai dari material dibandingkan dengan kriteria yang muncul dengan sendirinya. Evaluasi termasuk di dalamnya peninjauan kembali dan penegasan dari bukti, fakta-fakta dan ide. Kemudian membuat suatu pernyataan dan penilaian secara tepat. Contohnya memilih solusi yang paling efektif, mencari dan menerima kandidat yang paling baik, menjelaskan dan memberikan alasan dalam penentuan anggaran baru.

2.5.2 Ranah Afektif

Ranah ini mencakup cara atau tata karma yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat emosional, seperti perasaan (*feeling*), nilai-nilai, apresiasi, antusiasme (semangat), motivasi dan tingkah laku. Terdapat lima kategori dalam hal ini. Dimulai dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks.

1. Menerima fenomena sebagai kesadaran, kemauan untuk mendengar tentang suatu hal yang terpilih. Contohnya mendengarkan orang lain dengan penuh respek dan mengingat nama-nama orang baru yang baru dikenal.
2. Tanggapan terhadap fenomena, partisipasi aktif dalam proses belajar, menghadiri dan bereaksi terhadap fenomena khusus. Mempelajari hasil mungkin dapat menegaskan pemenuhan dari tanggapan, kemampuan untuk menanggapi atau kepuasan ketika menanggapi sesuatu (motivasi). Contohnya partisipasi dalam kelas diskusi, memberikan presentasi. Kritis untuk menyatakan dan menanyakan perilaku ideal, konsep, model baru dan sebagainya. Dengan tujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam, mengerti pengetahuan yang aman dan menerapkannya.
3. Menghargai, menjunjung tinggi nilai dari seseorang, fenomena atau tingkah laku. Dimulai dari rentang penerimaan yang paling dasar ke komitmen yang kompleks. Menghargai adalah dasar dari internalisasi dari nilai-nilai spesifik. Ketika kata kunci dari nilai-nilai ini diungkapkan ke dalam pembelajaran tingkah laku yang nyata dan teridentifikasi. Contohnya mendemonstrasikan kepercayaan di dalam proses demokrasi, sensitif terhadap perbedaan individual dan budaya (perbedaan nilai). Menunjukkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Mengusulkan rencana dalam rangka peningkatan sosial yang diikuti dengan komitmen untuk

melakukannya. Menginformasikan kepada manajemen akan hal yang benar-benar dirasa perlu untuk dirubah.

4. Organisasi, mengorganisasikan menjadi prioritas dengan membandingkan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik antara nilai-nilai tersebut, membuat suatu sistem sosial yang unik. Penekanannya dalam hal membandingkan, menciptakan dan menyatukan nilai-nilai. Contohnya mengenai kebutuhan akan keseimbangan terhadap kebebasan dan tingkah laku yang bertanggung jawab. Menerima tanggungjawab untuk tingkah laku tertentu. Menjelaskan peran dari perencanaan sistematis di dalam memecahkan masalah. Menerima etika standar dari profesi. Menciptakan rencana hidup yang harmoni dengan kemampuan dan kepercayaan. Memprioritaskan waktu secara efektif terhadap organisasi, keluarga dan diri sendiri.
5. Menginternalisasi nilai, memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah laku mereka. Tingkah laku dapat meresap, konsisten, dapat diprediksi dan paling penting karakteristik dari pelajar. Objek instruksional fokus dengan pola-pola umum dari murid. Seperti pola penyesuaian personal, sosial dan emosional. Contohnya menunjukkan kepercayaan diri saat bekerja sendiri, bekerja sama ketika dalam aktifitas grup (menunjukkan *team work*). Menggunakan pendekatan objektif di dalam pemecahan masalah. Menunjukkan komitmen profesional dalam hal etis di dalam praktek sehari-hari, meninjau kembali penilaian perubahan tingkah laku, menghargai orang apa adanya bukan dari segi fisiknya.

2.5.3 Ranah Psikomotorik

Ranah psikomotorik mencakup pergerakan fisik, koordinasi dan penggunaan kemampuan motorik. Pengembangan kemampuan ini memerlukan pelatihan dan dapat diukur baik secara kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur dan teknik dalam mengeksekusi. Ada tujuh kategori besar yang dituliskan di bawah ini, dimulai dari tingkah laku yang paling sederhana ke yang paling kompleks.

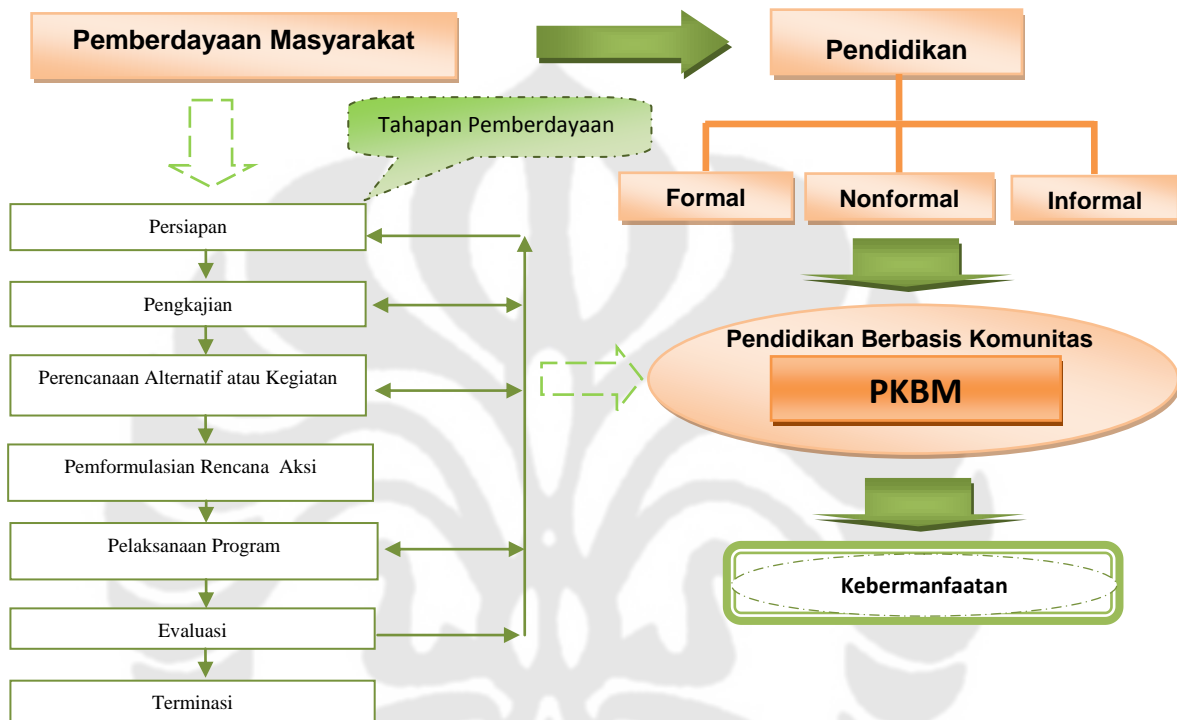
1. Persepsi, kemampuan untuk menggunakan isyarat sensorik untuk membimbing aktifitas motorik. Dimulai dari rangsangan sensori, melalui pemilihan isyarat, untuk mengubah isyarat. Contohnya mendeteksi isyarat komunikasi non verbal.

Memperkirakan kapan bola akan mendarat ketika dilempar dan mengetahui dimana kira-kira bola tersebut mendarat.

2. Set (kesiapan), kesiapan untuk bertindak. Kesiapan dalam hal mental, fisik dan emosional. Kesiapan ini adalah pembagian yang menentukan pemahaman awal dari tanggapan terhadap situasi yang berbeda. Contohnya mengetahui dan bertindak di dalam tingkatan-tingkatan proses manufaktur.
3. Respon (gerakan) terbimbing, tahapan awal dalam mempelajari kemampuan yang kompleks yang termasuk peniruan, mengetahui yang baik dan yang buruk. Performa yang baik muncul dari pelatihan yang sering dilakukan. Contohnya menjalankan suatu persamaan matematika, mengikuti instruksi untuk membuat suatu modul.
4. Mekanisme (gerakan terbiasa), adalah tahapan menengah dalam mempelajari kemampuan yang kompleks. Respon terhadap pembelajaran dapat menjadi kebiasaan dan pergerakan dapat diubah dengan adanya keandalan diri dan kemampuan. Contohnya menggunakan komputer dan menyetir mobil.
5. Tanggapan kompleks (gerakan kompleks), performa kemampuan dari tindakan motorik, termasuk di dalam pola pergerakan kompleks. Keahlian diindikasikan dengan kecepatan, akurasi dan koordinasi performa atau kemampuan yang tinggi. Hal ini membutuhkan energi minimum. Kategori ini termasuk tindakan nyata tanpa lelah (berhenti) dan tindakan yang dilakukan secara otomatis.
6. Adaptasi, kemampuan sangat dibutuhkan dan individu dapat memodifikasi pola-pola pergerakan untuk dicocokkan kepada keperluan. Contohnya tanggapan secara efektif terhadap pengalaman-pengalaman yang tidak terduga.
7. Kreativitas, menciptakan pola-pola pergerakan untuk situasi tertentu atau *problem* spesifik. Mempelajari hasil yang menekankan kreativitas berbasis pada pengembangan kemampuan. Contohnya mengkonstruksikan teori-teori baru, mengembangkan program-program pelatihan baru dan komprehensif.

Dari besaran konsep di atas, yaitu konsep pendidikan berbasis komunitas, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), pemberdayaan masyarakat, dan ranah pembelajaran (*learning domains*) dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka pemikiran untuk menganalisa hasil temuan lapangan yang telah dilakukan. Penelitian

ini berusaha menguraikan bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pendidikan berbasis komunitas, dalam hal ini oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memperoleh kebermanfaatan yang dirasakan warga belajar dari berbagai program pembelajaran yang diselenggarakan. Dari tujuan penelitian tersebut itulah lalu dituangkan dan dijelaskan melalui alur pemikiran pada gambar 2.4. berikut ini:



Gambar 2.4. Alur Pikir Penelitian

Sumber: Hasil olahan sendiri

Alur pikir penelitian pada gambar di atas dimulai dari pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui bidang pendidikan, dalam hal ini pendidikan nonformal. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai bagian dari pendidikan berbasis komunitas (*community based education*) berupaya melakukan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa untuk warga belajarnya, sehingga diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi warga belajar.